

Judul : Anggaran BLT Migor Rp. 6.9 Triliun
Tanggal : Selasa, 05 April 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Anggaran BLT Migor Rp 6,9 Triliun

Penyaluran BLT minyak goreng akan dilakukan pada April.

■ NOVITA INTAN, S BOWO PRIBADI

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (migor). Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, BLT tersebut diberikan kepada 23,5 juta penerima.

Febrio memerinci, anggaran sebanyak Rp 6,15 triliun dialokasikan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program bansos pemerintah. Sisanya sebesar Rp 750 miliar dialokasikan untuk pemilik warung dan pedagang kaki lima (PKL). "Jadi, total anggaran yang disiapkan Rp 6,9 triliun," kata Febrio saat webinar *Macroeconomic Update 2022*, Senin (4/4).

Febrio mengatakan, ada sebanyak 20,5 juta KPM yang tergabung dalam program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako yang akan mendapatkan BLT migor. "Sedangkan PKL makanan atau warung yang menggunakan minyak goreng, sekitar 2,5 juta warung," kata Febrio.

Masing-masing penerima BLT migor akan mendapatkan Rp 100 ribu per bulan selama tiga bulan. Namun, pembayarannya akan dilakukan sekaligus pada April sebesar Rp 300 ribu. Febrio menyebut, BLT ini akan mulai dibagikan pada April. Hal ini mengingat ada momentum bulan puasa dan lebaran, sehingga

bisa memberikan manfaat yang lebih bagi para penerima bantuan.

"Untuk penyalurannya, kepada penerima bansos pemerintah akan diserahkan melalui Kementerian Sosial. Sedangkan PKL akan diberikan melalui TNI dan Polri. Dari Kementerian Sosial bisa melalui PT Pos dan Bank Himbara," ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus mengupayakan agar kebijakan pemerintah pusat, terkait penyaluran BLT migor.

Di sisi lain, Pemprov Jawa Tengah akan terus mengupayakan agar harga migor curah tetap terjangkau oleh masyarakat, dengan harga di tingkat konsumen sebesar Rp 14 ribu per liter.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, Pemprov Jawa Tengah akan membantu untuk menyiapkan agar penyaluran BLT migor dapat dilakukan dengan lancar. Ia yakin penyaluran berjalan lancar karena datanya sudah jelas, sesuai dengan penerima PKH. "Tinggal dikirim BLT minyak goreng sesuai data penerima," katanya.

Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PKS, Amin Ak, meminta pemerintah menyelesaikan krisis migor secara komprehensif dan sistemis. Pemerintah diharapkan, memulai penyelesaian krisis migor dari sumber masalahnya.

Dia juga mempertanyakan kebi-

jakan pemberian BLT sebesar Rp 100 ribu per bulan kepada masyarakat. Sepengetahuan dirinya, kebijakan tersebut diambil pemerintah dari program reguler bantuan sosial Kementerian Sosial. "Kalau itu benar, berarti kebijakan itu hanya 'membuat judul baru'," katanya.

Kebijakan tepat

Ekonom senior Chatib Basri yang juga mantan menteri keuangan menilai, pemberian BLT minyak goreng kepada 20,5 juta KPM bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan 2,5 juta PKL makanan sudah tepat. "Jadi langkah pemerintah sudah benar, harga mengikuti pasar dan kemudian memberikan BLT," katanya dalam *Indonesia Macroeconomic Updates 2022* di Jakarta, kemarin.

Chatib mengatakan, keputusan pemerintah untuk memberikan BLT minyak goreng akan lebih menasar kelompok masyarakat yang benar-benar rentan dibandingkan subsidi, melalui penetapan harga eceran ter-

tinggi (HET). Menurut dia, kebijakan pemberian subsidi melalui penetapan HET pada minyak goreng beberapa waktu lalu, justru kurang tepat karena seluruh kalangan masyarakat dapat menikmati sehingga minyak goreng menjadi langka.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sempat menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit sebelum akhirnya dicabut. Chatib melihat sejauh ini ada dua upaya yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga energi akibat krisis, yaitu menyubsidi harganya melalui HET atau *price control*.

Langkah kedua adalah melepas harga tersebut sesuai mekanisme pasar yang meningkatkan inflasi, tapi dimitigasi melalui pemberian subsidi yang lebih *targeted* kepada masyarakat miskin. Ia mengingatkan, langkah pertama bukan merupakan keputusan yang tepat karena akan menyebabkan barang tersebut langka dan sudah dibuktikan di hampir semua negara, termasuk Polandia dan Amerika Latin.

Oleh sebab itu, ia menuturkan, keputusan pemerintah untuk mencabut subsidi minyak goreng melalui HET dan mengalihkannya kepada BLT sudah sangat tepat. Pemberian BLT minyak goreng juga akan memberikan beban yang lebih kecil kepada APBN dibandingkan memberi subsidi, melalui HET karena jumlah penikmatnya lebih sedikit dan sesuai.

■ ed: satria kartika yudha



Pemerintah diharapkan, memulai penyelesaian krisis migor dari sumber masalahnya.